

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, H. D. (2019) 'Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pekalongan', *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), pp. 50–68. doi: 10.14710/dialogue.v1i2.6613.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bhakti, R. T. A. (2016) 'Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Klausula Baku Di Lingkungan Perbankan', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(2), p. 60. doi: 10.33884/jck.v4i2.934.
- Busro, A. (no date) 'Sepeda Motor Yang Dititipkan Pada', pp. 268–277.
- Edi Yanto, Imawanto, T. Y. (2020) 'Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), p. 112. doi: 10.31764/jmk.v11i1.2264.
- Ediputra and Reza (2014) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1), pp. 1–20.
- Kade Ari Dwi Putra (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir', *Perspektif*, 20(1), p. 41. doi: 10.30742/perspektif.v20i1.123.
- Larasati, D. C. and Rohman, A. (2020) 'Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang)', *Reformasi*, 10(1), pp. 45–60. doi: 10.33366/rfr.v10i1.1801.
- Michael (2020) 'TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU Di zaman yang serba ramai dan juga sibuk ini banyak sekali pusat perkantoran dan juga pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan tempat parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan dari or', 3, pp. 46–56.
- Nurhafni, N. and Bintang, S. (2018) 'Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), pp. 473–494. doi: 10.24815/kanun.v20i3.10969.
- Parmitasari, I. (2016) 'Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir', *Jurnal Yuridis*, 3(1), pp. 20–36.
- Pranoto, P. and Dianti, N. E. (2014) 'Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Privat Law*.
- Rachmanto, A. D. (2020) 'Putusan Mahkamah Agung Perlindungan Konsumen, Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

- Keuangan', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(2), pp. 366–388. doi: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.12.
- Saepudin, E. (2011) 'Model Pembelajaran Demokrasi Melalui Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus Terhadap Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)', *Universitas Pendidikan Indonesia*, p. 127.
- Situmeang, T. (2020) 'FOCUS HUKUM UPMI Volume I No . 2 FOCUS HUKUM UPMI Volume I No . 2', I(2), pp. 80–89.
- Suprianto, D. (2015) 'Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia', pp. 13–27.